

ABSTRACT

FRAMING NEWS OF TNI REFORMATION

(Robert M. Entman Framing Analysis Regarding The News of TNI Reform at Koran Tempo on 7 February 2018 Edition)

By:

RYAN CRISTI SIMATUPANG

NIM. 41814130

This theses under guidance:

Dr. Kiki Zakiah, M.Si

This research was conducted in order to find out the news framing of the TNI reform by the daily newspaper Koran Tempo in the February 7, 2018 edition. This research uses a qualitative approach with the design of Robert Mathew Entman's framing analysis. To achieve this goal, the research question is defining the problem, diagnose cause, make moral judgement and treatment recommendation of the news. Data collection techniques used are by way of documentation, in-depth interviews, and literature study.

The results of this research show that it was the involvement of the TNI which penetrated into civilian areas that made a decadence TNI reform. The indication is that TNI does a lot cooperation agreements with other institutions which are not their fields in defense. With the critics, Koran Tempo wanted to express that TNI reform must be accompanied. Then, the treatment recommendation is to return to Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 about TNI.

Researcher concluded that Koran Tempo also indirectly wanted to giving orders to the government for issuing derivatives of the Undang-Undang TNI as a technical rule regarding the involvement of the TNI.

The suggestions from researcher are that the Koran Tempo should provide space for discourse battles. Explore further why the TNI agreed on various collaborations with other institutions outside of its field.

Keywords: News Framing, Framing Analysis Robert M. Entman, TNI Reform, Koran Tempo

ABSTRAK

PEMBINGKAIAN BERITA REFORMASI TNI

(Analisis Framing Robert M. Entman mengenai Pembingkaiian Berita Reformasi TNI di Koran Tempo Edisi 7 Februari 2018)

Oleh:

RYAN CRISTI SIMATUPANG

NIM: 41814130

Skripsi ini di bawah bimbingan:

Dr. Kiki Zakiah, M.Si

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pembingkaiian berita reformasi TNI yang dilakukan oleh surat kabar harian Koran Tempo pada edisi 7 Februari 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis framing Robert Mathew Entman. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah pendefinisian masalah, memperkirakan masalah atau sumber masalah, membuat keputusan moral dan menekankan penyelesaian pada berita ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan TNI yang merambah ke wilayah sipil yang membuat kemunduran bagi reformasi TNI. Indikasinya adalah sejumlah kesepakatan kerja sama TNI dengan lembaga lain yang bukan bidangnya dalam pertahanan. Dengan kritik tegas, Koran Tempo ingin menyuarakan bahwa reformasi TNI harus dikawal bersama-sama. Kemudian, penekanan dalam penyelesaiannya adalah agar kembali ke Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Peneliti menyimpulkan bahwa Koran Tempo secara tidak langsung juga ingin memberi penegasan pada pemerintah untuk mengeluarkan turunan dari Undang-Undang TNI sebagai aturan teknis tentang pelibatan TNI.

Saran dari peneliti adalah Koran Tempo hendaknya memberikan ruang untuk pertarungan wacana. Telusuri lebih jauh mengapa TNI menyepakati pelbagai kerja sama dengan lembaga lain di luar bidangnya.

Kata Kunci: Pembingkaiian Berita, Analisis Framing Robert M. Entman, Reformasi TNI, Koran Tempo

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 7 Februari 2018 Koran Tempo sebagai media surat kabar harian nasional Indonesia, sempat mengisi bagian headline dan berita utamanya mengenai Reformasi TNI. Dalam pemberitaan tersebut, peneliti menilai bahwa Koran Tempo seperti menekankan bahwa reformasi TNI berjalan mundur. Peneliti memperhatikan dari judul berita di headline (Reformasi TNI Berjalan Mundur), dimana, frasa “Berjalan Mundur” dicetak menggunakan tinta berwarna merah. Selain itu, terdapat juga paragraph berita berisi pendapat dari sejumlah kalangan yang menilai bahwa reformasi TNI mengalami kemunduran yang terdapat di bagian Berita Utama. Berikut sebagian kutipan tersebut:

”Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami kemunduran. Indikasinya antara lain penandatanganan 30 nota kesepahaman antara TNI dan lembaga lain. Dalam kerja sama itu, TNI merambah peran di luar tugas utamanya di bidang pertahanan dan kedaulatan Negara. Terakhir, TNI membuat nota kesepahaman dengan Kepolisian RI untuk terlibat dalam penanganan unjuk rasa.” (*Sumber: Berita Utama Koran Tempo edisi 7 Februari 2018*)

Isu kemunduran reformasi TNI ini mulai mencuat ke media massa setelah pada tanggal 29 Januari 2013, mantan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono bersama dengan mantan Kapolri Jenderal Timur Pradopo saat itu membuat nota kesepahaman yang menjadikan pintu TNI untuk masuk ke dalam kegiatan dan kewenangan Kepolisian. Kemudian setelah berumur lima tahun dan kedaluarsa, nota kesepahaman tersebut diperpanjang oleh

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menjabat saat ini pada tanggal 23 Januari 2018 dalam nota kesepahaman atau MoU Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018. Isi dari perjanjian tersebut adalah kesepakatan mengenai lingkup kerjasama, selain menghadapi unjuk rasa dan mogok kerja, juga termasuk menghadapi kerusuhan, mengangani konflik sosial, mengamankan kegiatan masyarakat dan atau pemerintah yang berpotensi rawan ricuh, dan situasi lainnya yang memerlukan bantuan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Paradigma baru TNI sebagai bentuk reformasi TNI ini didasarkan pada ide bahwa tentara secara bertahap meninggalkan peran sosial dan politik dalam ranah sipil. Untuk kemudian kembali pada peran dan kewenangan tentara sesuai dengan amanat UUD 1945. Karena tugas pokok TNI adalah berfokus dalam menjalankan bidang pertahanan nasional sesuai fungsinya. Inti atau esensi dari reformasi TNI selain itu adalah memusatkan perhatian kepsda tugas pokok pertahanan Negara, menyerahkan fungsi dan tanggungjawab keamanan dalam negeri kepada Kepolisian Republik Indonesia, meningkatkan konsistensi implementasi doktrin gabungan, dan meningkatkan kinerja manajemen internal.

Namun dalam pelaksanaannya, perwujudan reformasi TNI terasa belum secara penuh rampung. Walaupun pemerintah dan parlemen telah mencabut doktrin dwifungsi dan memisahkan TNI dengan Polri melalui ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dimana TNI ditugasi untuk urusan pertahanan Negara dan Polri ditugasi untuk menangani keamanan dan

ketertiban masyarakat, namun TNI mulai kembali masuk ke kewenangan polisi di bidang keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Tujuan peneliti mengambil berita di Koran Tempo edisi 7 Februari 2018 untuk dijadikan objek penelitian selain karena sebagian judul berita yang dicetak menggunakan tinta merah pada frasa “Berjalan Mundur” yang seperti mempertanyakan kemajuan Reformasi TNI, juga karena Koran Tempo dikenal berani mengangkat isu-isu hukum dan politik dan merupakan media berformat depolitisasi yang tak memihak partai politik manapun dan tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah.

Pada kasus Koran Tempo, walaupun berita sudah dikatakan berimbang dengan menyuguhkan pendapat pro dan kontra dimana pemberitaan tersebut diakhiri dengan pernyataan bersifat sanggahan dari Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Mohamad Sabrar Fadhillah menyatakan bahwa reformasi TNI tetap berjalan dan tidak mengalami kemunduran. Peneliti dengan sadar menilai bahwa isi berita yang ditonjolkan dan menjadi menarik untuk dibaca adalah mengenai keraguan sejumlah kalangan terhadap semangat reformasi TNI. Hal ini tidak lepas dari nilai dan cara berpikir pembuat berita.

Sehubungan dengan itu, dalam pandangan konstruktivis, realitas dunia bukanlah realitas yang natural. Realitas sosial adalah hasil dari konstruksi, contohnya realitas yang disajikan oleh media massa Koran Tempo dalam beritanya mengenai reformasi TNI dalam edisi 7 Februari 2018, adalah hasil

konstruksi di mana wartawan tidak menyuguhkan berita apa adanya.

Pada prinsipnya, berita merupakan laporan kejadian sebuah peristiwa atau pendapat yang menarik menjadi penting dan disajikan secepat mungkin kepada khalayak luas. Berita merupakan bagian terpenting dalam penyampaian sebuah informasi yang semua orang butuhkan, dimana berita adalah rangkaian informasi mengenaifakta dan ide terbaru yang benar, secaraberkala melalui media, seperti surat kabar, radio, televise, atau media online internet, sehingga menarik perhatian orang yang melihat, mendengar dan membaca berita tersebut. (Sobur, 2002:164)

Kemudian, konstruksi dari makna atau arti mengenai berita yang disajikan bukan terletak pada berita itu sendiri. Melainkan timbul dari hasil konstruksi pembaca. Karenanya, pembaca yang satu dengan pembaca yang lainnya yang membaca suatu berita yang sama, akan memiliki pemahaman yang berbeda tergantung sesuai dengan pandangan, pengalaman, dan persepi masing-masing pembaca. Dengan kata lain, analisis *framing* dapat dipakai untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan atau media massa saat mengkontruksi fakta, yaitu dengan mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti agar lebi diingat, untuk mengiringi khalayak sesuai perspektifnya. Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. Di balik semua ini, pengambilan keputusan mengenai sisi manayang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para

wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita. (Sobur, 2002:163)

Pada dasarnya, pola yang ditonjolkan tersebut tidaklah dimaknai sebagai bias, tetapi secara ideologis sebagai strategi wacana: upaya menyuguhkan pada public tentang pandangan tertentu agar pandangannya lebih diterima. (Sobur, 2002:164)

Metode analisis framing adalah salah satu metode alternatif yang dapat dipakai dan digunakan untuk mengungkap dan mengetahui bagaimana realitas dibingkai dalam penyajian sebuah berita. Dimana, realitas yang disajikan oleh suatu pemberitaan merupakan realitas sosial yang dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan makna tertentu. Dalam sudut pandang ilmu komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini memperhatikan seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita supaya lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi pembaca sesuai perspektifnya. (Sobur, 2002:162)

Kalimat atau frasa yang ditonjolkan dari suatu berita dapat diartikan sebagai tujuan untuk membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna bagi pembaca, atau agar lebih mudah diingat oleh khalayak pembaca. Kemudian, dengan menggunakan metode analisis framing, dapat dilihat bagaimana teks komunikasi yang diberi tekanan lebih ditampilkan oleh pembuat berita, dan bagaimana mana yang ditonjolkan atau dianggap penting yang dapat dilihat dari pengulangan atau penekanan oleh pembuat berita.

Salah seorang ahli yang memberikan sumbangan pemikiran dan

dasar-dasar ide bagi analisis framing dalam studi analisis isi media adalah Robert M. Entman. Dengan menggunakan model analisis Entman, dapat dilihat bagaimana teks komunikasi yang disajikan dan bagaimana representasi yang ditampilkan secara menonjol.

Dengan menggunakan konsep analisis framing Entman, suatu berita dapat digambarkan bagaimana proses seleksi isu yang dilakukan dan aspek tertentu apa yang ditonjolkan dari penyuguhan realitas oleh media tersebut. Dengan dimensi seleksi isu dan penonjolan aspek tersebut, akan membuat informasi lebih bermakna, menarik, berarti, atau diingat oleh khalayak. Dalam konsepsi ini, analisis framing ini memiliki fokus pada pemberian definisi masalah, memperkirakan penyebab masalah, membuat pilihan moral dari masalah tersebut, dan rekomendasi penyelesaian masalah.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah Makro

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah makro sebagai berikut. “Bagaimana Pembingkai berita Reformasi TNI dalam Koran Tempo edisi 7 Februari 2018?”

1.2.2. Rumusan Masalah Mikro

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah mikro sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembingkai berita Reformasi TNI dalam Koran Tempo edisi 7 Februari 2018 dilihat dari *Define Problems* (Pendefinisian Masalah)?

2. Bagaimana Pembingkai berita Reformasi TNI dalam Koran Tempo edisi 7 Februari 2018 dilihat dari *Diagnose Cause* (Memperkirakan Masalah)?
3. Bagaimana Pembingkai berita Reformasi TNI dalam Koran Tempo edisi 7 Februari 2018 dilihat dari *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)?
4. Bagaimana Pembingkai berita Reformasi TNI dalam Koran Tempo edisi 7 Februari 2018 dilihat dari *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana “Pembingkai berita Reformasi TNI dalam Koran Tempo edisi 7 Februari 2018.”

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini secara teoritis berguna sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang Ilmu Komunikasi secara umum, terutama dalam kajian Komunikasi Massa dan secara khusus memberikan sumbangsih dalam bidang Jurnalistik sebagai kajian tentang pembingkai berita dalam teks media cetak dengan menggunakan model Robert M. Entman.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini merupakan

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pembingkai berita ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pembingkai berita Reformasi TNI dalam Koran Tempo edisi 7 Februari 2018 dilihat dari *Define Problems* (Pendefinisian Masalah)
2. Untuk mengetahui Pembingkai berita Reformasi TNI dalam Koran Tempo edisi 7 Februari 2018 dilihat dari *Diagnose Cause* (Memperkirakan Masalah)
3. Untuk mengetahui Pembingkai berita Reformasi TNI dalam Koran Tempo edisi 7 Februari 2018 dilihat dari *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)
4. Untuk mengetahui Pembingkai berita Reformasi TNI dalam Koran Tempo edisi 7 Februari 2018 dilihat dari *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

salah satu bentuk aplikasi dari Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bekal pengetahuan dan menambah wawasan bagipeneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

2. Bagi Universitas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam dunia jurnalistik, dan juga menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik pada penelitian analisis *framing*.

3. Bagi perusahaan media, diharapkan dapat menjadi sumbangan dan tambahan referensi yang dapat

menjadi masukan bagi Koran Tempo dalam menyampaikan informasi kepada khalayak

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Komunikasi Massa

Banyak definisi tentang komunikasi massa yang telah dikemukakan para ahli komunikasi. Banyak ragam dan titik tekan yang dikemukakannya. Namun, dari sekian banyak definisi itu ada benang merah kesamaan definisi satu sama lain. Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). Sebab, awal perkembangannya saja, komunikasi massa berasal dari pengembangan kata *media*.

Menurut Nurudin dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Komunikasi Massa*, ada satu definisi komunikasi massa yang dikemukakan Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) yang akan menjelaskan apa itu komunikasi massa. Menurut mereka sesuatu bisa didefinisikan sebagai Komunikasi Massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandhalkan peralatan modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disiarkan melalui media modern pula yang diantaranya surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan diantara media tersebut.
2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya bermaksud mencoba berbagai pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas *audience* dalam

komunikasi massa inilah yang kemudian dibedakan pula dengan jenis komunikasi yang lainnya. Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak saling mengetahui satu dengan yang lainnya.

3. Pesan adalah milik orang banyak. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan diterima oleh khalayak. Karenaitu, diartikan milik orang banyak.
4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya tidak berasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasanya berorientasi pada keuntungan, bukan organisasi suka rela atau nirlaba.
5. Komunikasi massa dikontrol oleh *gatekeeper* (penapis informasi). Artinya, pesan-pesan yang disebar atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. Ini berbedadengan komunikasi antar pribadi, kelompok atau publik di manayang mengontrol bukan sejumlah individu. Beberapa individu dalam komunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi, memperluas pesan yang disiarkan. Contohnya adalah seorang reporter, editor film, penjaga rubric, dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi sebagai *gatekeeper*.
6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya, dalam

komunikasi antar-persona. Dalam komunikasi ini umpan balik langsung dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak bisa langsung dilakukan atau disebut tertunda (*delayed*). (Nurudin, 2014:8-9)

2.2. Media Massa dan Pers

Menurut Cangara, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Komunikasi*, sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari beberapa orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
2. Bersifat satu arah, dengan kata lain komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima pesan. Kalaupun terjadi reaksi atau umpan balik, memerlukan waktu dan tertunda.
3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang secara bersamaan.
4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar dan sebagainya.
5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, gender dan ras. (Cangara, 2014:140-141).

Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni media massa cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah, sedangkan media massa elektronik meliputi televisi, radio, siaran

film, dan media *on-line* (internet). (Ardianto, 2007:103).

2.3. Surat Kabar

Sebagai media cetak, kelebihan surat kabar adalah sebagai catatan tertulis yang mampu merekam peristiwa/kejadian di masa lampau meskipun peristiwa itu sudah terjadi beberapa puluhan tahun yang lalu. Sehingga sangat disukai untuk dikliping atau diarsipkan sebagai dokumentasi peristiwa. (Tamburaka, 2013:45-46)

Dari empat fungsi media massa (informasi, edukasi, hiburan dan persuasif), fungsi yang paling menonjol dari surat kabar adalah informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama khalayak membaca surat kabar, yaitu keingintahuan akan setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Karenanya, sebagian besar rubrik surat kabar terdiri dari berbagai jenis berita. Namun demikian, fungsi hiburan surat kabar pun tidak terabaikan karena tersedianya rubrik artikel ringan, *feature* (laporan perjalanan, liputan tentang profil seseorang yang unik), rubrik cerita bergambar atau komik, serta cerita bersambung. Begitu pula dengan fungsinya mendidik dan memengaruhi akan ditemukan pada artikel ilmiah, tajuk rencana atau editorial dan rubrik opini. Fungsi pers, khususnya surat kabar pada perkembangannya bertambah, yakni sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif. (Ardianto, 2007:111-112)

2.4. Berita

Berita berasal dari kata *Vrit* yang artinya “ada” atau “terjadi”, tetapi dapat pula dikatakan *Vritta* yang berarti “kejadian yang telah terjadi”. Istilah *Write* (menulis) dalam bahasa Inggris berarti

kata kerja yang menunjukkan aktifitas menulis. Sedangkan istilah *news* dalam bahasa Inggris untuk maksud berita, berasal dari *new* (baru) dengan konotasi kepada hal-hal yang baru. Dalam hal ini segala yang baru merupakan bahan informasi bagi semua orang yang memerlukannya. Dengan kata lain, semua hal yang baru merupakan etimologis istilah berita dalam bahasa Indonesia mendekati istilah *bericht* (*en*) dalam bahasa Belanda. Besar kemungkinan kedua istilah itu berketurunan mengingat Indonesia lama dijajah Belanda. (Tamburaka, 2013:87)

Kemudian, menurut Kustadi Suhandang dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Jurnalistik, Seputar Organisasi, Produk & Kode Etik*, berita adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa actual yang menatik perhstian orang banyak. Peristuwu yang melibstkan fakta dan data di alam srnesta ini, yang trjadinya pun actual dalam arti “barusaja” atau hsnagan dihicarakan prang bamyak. (Suhandang, 2010:103)

Berita sendiri berbeda menurut karakteristik media massa, bila berita itu dimuat dalam media cetak koran dan majalah, maka ada ciri khasnya tersendiri yang lebih menekankan pada kekuatan *headline* (judul) berita, kepadatan informasi dalam bagan piramida terbalik, penempatan berita di halaman depan atau belakang, berita dengan foto atau tanpa foto, berita di halaman berwarna atau tidak berwarna. Gaya bahasa *straight news* atau *feature*, semuanya memainkan peranan penting dalam pembuatan berita di media cetak. (Tamburaka, 2013:89)

2.5. Berita Politik

Dikutip dari buku karya Sedia Willing Barus yang berjudul *Jurnalistik;*

Petunjuk Teknis Menulis Berita, berita politik adalah berita yang menyangkut kegiatan politik atau peristiwa di sekitar masalah-masalah ketatanegaraan dan segala hal yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan Negara. Politik di sini harus diartikan sebagai upaya manusia untuk menata kehidupan rakyat, pemerintahan, dan Negara demi mencapai suatu tujuan dan cita-cita bersama yang luhur, yaitu perbaikan hidup atau nasib bangsanya. (Barus, 2010:41)

Jakob Oetama dalam Barus (2010) menggambarkan bahwa kekuasaan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam arti luas, merasuki seluruh tubuh masyarakat sampai ke tingkat terbawah. Tali temalnya bersifat vertikal dan horizontal, dan dampak kebijakan dan tindakannya pun besar dalam masyarakat. (Barus, 2010: 42-43)

2.6. Reformasi TNI

“Kata orang, sulit untuk membayangkan politik di Indonesia tanpa memperhitungkan peran tentara di dalamnya. Atau sebaliknya, terlalu berlebihan bila masalah kenegaraan hanya diserahkan kepada kaum sipil. Khususnya sejak Pemerintahan Orde Baru, keterlibatan TNI dalam berbagai kehidupan non-militer di Indonesia dan khususnya politik, telah merupakan bagian integral dari dinamika serta dialektika kepolitikan nasional. Karena begitu besarnya pengaruh militer dalam politik, maknanya tidak lagi hanya ditafsirkan sebagai bentuk dominasi, melainkan telah berubah menjadi fenomena hegemonik militer atas persoalan-persoalan sipil. Melalui doktrin Peran Sosial Politik TNI dan ketentuan perundangan yang mendasarinya, kemudian berbagai bentuk implementasinya-baik struktural maupun

fungsional-semuanya menggaris-bawahi anggapan bahwa kehadiran TNI dalam kehidupan sosial politik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan RI.” (Samego, 2000:46)

“Sesuai dengan kebutuhan zaman, peran dan fungsi TNI pun harus senantiasa diperbaharui. Bila untuk menjadi sebuah kekuatan professional baik secara ideologis dan ekonomis masih belum memungkinkan, yang terbaik bagi TNI adalah menyesuaikan dengan perkembangan lingkungannya. Di masa lalu, TNI dianggap sebagai tentara revolusi, kemudian di zaman Pemerintahan Soeharto, TNI dipandang sebagai alat "stability and growth," sekarang, tentu harus berubah menjadi kekuatan reformasi yang menjunjung tinggi penegakan hukum, kesetaraan antarwarga serta proses demokratisasi dan perluasan partisipasi politik secara otonom.”(Samego, 2000:54)

Tahun 2004 menjadi tahun terbitnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hadirnya Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 ini merupakan salah satu wujud telah dilaksanakannya Reformasi Internal TNI karena Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1998 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia dan demokrasi serta perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, telah diatur secara jelas tentang jati diri, kedudukan, peran, fungsi dan tugas, postur dan organisasi, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI serta tentang Prajurit secara

lengkap untuk dijadikan pedoman dan payung hukum bagi TNI.

Hal-hal yang sangat mendasar dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI adalah dicantumkannya pasal 39 yang mengatur tentang larangan bagi anggota TNI. Pasal tersebut berbunyi Prajurit dilarang terlibat dalam:

- a. Kegiatan menjadi anggota partai politik
- b. Kegiatan politik praktis
- c. Kegiatan bisnis, dan
- d. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislative dalam Pemilihan Umum dan jabatan politis lainnya. (Basuki, 2013: 182-183)

2.7. Konstruksi Realitas Media Massa

“Konstruksi sosial adalah sebuah proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang terjadi antara individu di dalam masyarakat. Ketiga proses tersebut terjadi secara simultan membentuk dialektika, serta menghasilkan realitas sosial berupa pengetahuan umum, konsep, kesadaran umum, dan wacana publik. Konstruksi sosial dibangun oleh individu dan masyarakat secara dialektika. Dan yang dimaksud konstruksi sosial itu adalah realitas sosial yang berupa realitas obyektif, subyektif, maupun simbolis. Sedangkan materi realitas sosial itu adalah konsep-konsep, kesadaran umum, dan wacana publik”. (Berger dan Luckmann, dalam Bungin, 2008:212)

Gagasan dari Berger tersebut dapat diimplementasikan ke dalam sebuah berita dimana wartawan melihat sebuah peristiwa yang terjadi namun setiap wartawan memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat peristiwa tersebut. Hal ini didasari dari berita yang dibuat oleh wartawan, walaupun kasus yang dihadapi sama tapi

carapenyampaian isi berita berbeda. Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan sebuah peristiwa atau fakta yang riil berita adalah produk interaksi antara wartawan dan fakta. Dalam prosesnya wartawan dilandasi oleh realitas, dimana realitas dimaknai oleh wartawan untuk menghasilkan sebuah realitas yang dituangkan ke dalam teks berita.

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas melihat fenomena media massa menjadi sangat substansial dalam proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang kemudian dikenal sebagai “konstruksi realitas media massa”.

“Substansi dari konstruksi realitas media massa adalah pada sirkulasi informasi yang lebih cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya pun merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis.” (Bungin, 2008:194)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai perspektif subjektif yang bersifat interpretif (menggunakan penafsiran). Di mana metode penelitian merupakan cara ilmiah yang sistematis.

Sesuai dengan penjelasan dari Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln bahwa peneliti kualitatif lazim menelaah hal-hal yang berada dalam lingkungan alamiahnya, berusaha memahami, atau menafsirkan, fenomena berdasarkan makna-makna yang orang berikan kepada hal-hal tersebut. (Denzin dan Lincoln dalam Mulyana, 2008:5)

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain analisis *framing* dari Robert M. Entman. Dalam bidang studi Ilmu Komunikasi, *framing* merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksikan oleh media massa. Dalam prakteknya, *framing* dilakukan oleh media massa dengan menyeleksi isu-isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain. Aspek penonjolan tersebut dilakukan dengan menggunakan strategi wacana, seperti penempatan posisi berita yang ditampilkan, pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat isi berita, dan lain sebagainya. Dalam konsep Robert M. Entman, *framing* merujuk pada bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan.

Konsepsi mengenai *framing* dari Entman menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. *Define Problems* (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat dilihat mengenai *framing*. Elemen ini merupakan *master frame*/ bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Kemudian, *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai actor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula. Lalu, *make*

moral judgement (membuat pilihan moral) adalah elemen yang dipakai untuk membernarkan/ memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang telah dibuat. Dibutuhkan gagasan yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Dan elemen lainnya adalah *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. (Eriyanto, 2002:189-191)

3.2. Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Studi Pustaka

Peneliti mengambil bahan data penelitian primer yaitu berita mengenai reformasi TNI di Koran Tempo pada edisi 7 Februari 2018 sebagai objek penelitian.

3.2.2. Studi Lapangan

1. Internet Searching

Dalam teknik pengumpulan data, salah satunya peneliti melakukan *internet searching* untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Seperti mengunjungi situs dan artikel yang dipublikasi secara *online* atau dalam bentuk *Portable Document Format* (pdf).

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam atau tak terstruktur mirip dengan percakapan informal. Wawancara jenis ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua partisipan penelitian, tetatapi susunan kata dan urutannya

disesuaikan dengan situasi saat berhadapan dengan partisipan (Mulyana, 2013: 181).

Wawancara sebagai sumber data penelitian sekunder dilakukan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak dapat didapatkan melalui *internet searching*. Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang dianggap sebagai orang yang paling tahu mengenai masalah yang akan diteliti sebagai Redaktur Koran Tempo Kompartemen Nasional.

3.3. Uji Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan, peneliti melakukan beberapa langkah pengujian data melalui uji keabsahan data untuk melakukan pemeriksaan ulang pada data yang telah dikumpulkan. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan dan data yang dilaporkan peneliti, dengan kriteria kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian.

1) Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu

benar/dipercaya atau tidak. (Sugiyono, 2010:272)

Peneliti akan membaca berbagai referensi buku mengenai isu Reformasi TNI. Dengan cara ini maka kepastian data dan urutan fenomena dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali dari data yang telah didapat. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat meningkatkan kredibilitas data dan peneliti juga dapat memberikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

2) Diskusi dengan teman sejawat

Langkah ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat *me-review* persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. (Moloeng, 2007:334)

3) Triangulasi

Definisi teknik triangulasi data yaitu sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2007:330). Teknik triangulasi yang digunakan peneliti merupakan triangulasi sumber di mana. Sumber data yang dikumpulkan peneliti yakni dari teks berita (objek penelitian), buku referensi terkait, dan data wawancara mendalam bersama informan.

3.3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dilakukan peneliti selama proses penelitian terhitung sejak peneliti mengumpulkan data yang menyangkut masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti melalui empat tahap teknik analisis data, yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data atau seleksi data, tahap *display* atau penyajian data, dan tahap pengambilan atau penarikan kesimpulan dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Proses dalam tahapan-tahapan ini tidak berjalan secara linear atau searah melainkan bersifat simultan atau siklus yang interaktif.

1. Pengumpulan data (*data collection*)
2. Reduksi data (*data reduction*)
3. Penyajian data (*data display*)
4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verivication*)

4. Pembahasan

Surat kabar harian Koran Tempo edisi 7 Februari 2018, pada halaman Laporan Utama, berita berjudul “REFORMASI TNI BERJALAN MUNDUR; Tentara kian banyak berperan dalam wilayah sipil” memuat berita mengenai TNI yang terlalu mencampuri pelbagai urusan di ranah sipil setelah TNI mengadakan perpanjangan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang bantuan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti unjuk rasa dan mogok kerja buruh. Melalui berita tersebut, Koran Tempo menonjolkan fakta dan mengangkat isu mengenai kemunduran reformasi TNI.

Frasa “BERJALAN MUNDUR” dalam judul berita tersebut selain menggunakan huruf kapital juga dicetak dengan warna merah. Laporan utama surat kabar harian Koran Tempo ini dilengkapi

dengan infografik mengenai pelaksanaan reformasi TNI di masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

A. Pendefinisian Masalah

Koran Tempo menekankan bahwa reformasi TNI berjalan mundur, dimana TNI kian banyak berperan dalam wilayah sipil. Dalam hal ini, Koran Tempo ingin menyampaikan kritik tegas mengenai bagaimana jalannya reformasi TNI.

Jika dilihat dari urusan nasional. Reformasi TNI seharusnya berjalan sesuai dengan cita-cita dan semangat reformasi TNI dan tentu saja Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kemudian jika dilihat dari urusan pertahanan, regulasinya seharusnya lebih jelas lagi agar tidak tumpang tindih, contohnya mengenai nota kesepahaman antara TNI dengan POLRI untuk penanganan demonstrasi, klaim TNI adalah bahwa dari sisi TNI, kerja sama itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang di dalamnya ada poin membantu kepolisian. Tetapi ada juga poin yang mengatakan bahwa pengerahan kekuatan TNI atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus melalui keputusan politik Negara atau dalam situasi konflik. Tujuannya adalah supaya peran TNI benar-benar dihapuskan dari ranah sipil.

B. Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah

Tentara Nasional Indonesia adalah sebuah angkatan perang Indonesia yang berperan sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. Namun, kenapa TNI malah merambah tugas ke bidang lain, di luar bidangnya yaitu pertahanan. Itulah

yang ingin disampaikan Koran Tempo dalam elemen memperkirakan masalah atau sumber masalah.

Di sini, Koran Tempo memposisikan diri untuk menyoroti dan meluapkan kritikan sejumlah kalangan tentang lembaga Tentara Nasional Indonesia yang yang terlalu mencampuri pelbagai urusan di luar bidang pertahanan, dimana TNI menekan sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga lain.

C. Membuat Keputusan Moral

Sebagai media massa nasional, jurnalis Koran Tempo memiliki sikap, kewajiban, semangat dan gairah untuk mengawal pemerintahan, menjadi *watchdog*, dalam hal ini mengawal dan mengawasi jalannya reformasi TNI. Jika media tidak memberitakan, mungkin banyak orang akan lupa tentang cita-cita dan semangat reformasi TNI. Maka dari itu, Koran Tempo ingin menyampaikan dan menyuarakan bahwa reformasi TNI tak akan berjalan jika tidak dikawal dan diawasi bersama-sama.

Kemudian, walaupun berita tersebut memuat kritik tegas mengenai reformasi TNI, dan ditambah frasa “BERJALAN MUNDUR” pada judul beritanya yang dicetak dengan warna merah, Koran Tempo tetap melengkapi berita dengan kutipan dari narasumber yang bersebrangan, agar berita lengkap, adil dan berimbang.

D. Menekankan Penyelesaian

Lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI seharusnya menjadi tonggak atau pokok atau asal bagi ketentuan-ketentuan yang melibatkan peran TNI. Di sini Koran Tempo menekankan ada evaluasi kembali tentang peraturan peran TNI, seperti mengenai kesepakatan-kesepakatan kerja sama, agar jalannya cita-cita dan semangat reformasi TNI tidak lagi dinilai mundur.

5. Kesimpulan dan Saran

Koran Tempo memaknai sejumlah kesepakatan kerja sama dan nota kesepahaman TNI dengan lembaga lain di luar bidang pertahanan sebagai indikasi dari kemunduran reformasi TNI. Surat kabar harian Koran Tempo menekankan bahwa reformasi TNI berjalan mundur, sebagai kritik dimana TNI kian banyak berperan dalam wilayah sipil.

Koran Tempo tidak melihat sekedar tentang peran TNI yang merambah ke ranah sipil, tetapi melihat dengan *helicopter view* dimana hal tersebut mengancam semangat dan cita-cita reformasi TNI. Karena Koran Tempo melihat bahwa isu ini penting dan perlu dikawal, Koran Tempo menempatkan berita mengenai isu reformasi TNI di halaman muka.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan desain penelitian analisis pembeding berita model Robert M. Entman terhadap berita berjudul “Reformasi TNI Berjalan Mundur” di surat kabar harian Koran Tempo edisi 7 Februari 2018 pada bab empat, maka peneliti menyusun kesimpulan sebagai berikut :

1. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah) pada berita “Reformasi TNI Berjalan Mundur” di surat kabar harian Koran Tempo edisi 7 Februari 2018 adalah mengenai masalah regulasi, dimana sudah ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tetapi TNI masih dapat merambah ke ranah sipil yang mana membuat reformasi TNI dinilai berjalan mundur oleh pihak eksternal TNI.
2. *Diagnose Cause* (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) pada berita “Reformasi TNI Berjalan

Mundur” di surat kabar harian Koran Tempo edisi 7 Februari 2018 adalah sejumlah kesepakatan kerja sama TNI dengan lembaga lain di luar bidangnya, dan pensiunan TNI yang menjadi calon dalam pilkada.

3. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral) berita adalah memiliki sikap, kewajiban, semangat, dan gairah untuk mengawal dan mengawasi jalannya reformasi TNI dengan kritik tegas. Selain itu, Koran Tempo juga tetap melengkapi berita dengan kutipan dari narasumber yang bersebrangan, agar berita lengkap, adil dan berimbang.
4. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian), peneliti menyimpulkan bahwa Koran Tempo menekankan ada evaluasi kembali untuk membuat regulasi yang mengatur mengenai kebijakan-kebijakan TNI yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang TNI, agar cita-cita dan semangat reformasi TNI tetap berjalan.

5.2. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan kepada media massa Koran Tempo dari penelitian ini, yaitu sebaiknya pemberitaan mengenai reformasi TNI di Koran Tempo hendaknya memberikan ruang untuk pertarungan wacana. Dalam berita “Reformasi TNI Berjalan Mundur” ini, wacana yang ditonjolkan adalah bagaimana TNI dianggap keliru dan melakukan kesalahan dalam menjalankan reformasi TNI. Meskipun begitu, jika ditelusuri lebih jauh mengenai pelbagai kesepakatan kerja sama antara TNI dan lembaga lain di luar bidangnya, bisa saja terdapat fakta-fakta yang dapat dianggap sebagai keputusan yang baik.